



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUSRIADI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
3. NHK : 515677

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.283.800.000**

1. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/100 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 410 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 123.000.000
4. Tanah Seluas 138 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 41.400.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 410 m2/100 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/168 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/48 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
8. Tanah Seluas 1338 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 66.900.000
9. Tanah Seluas 4900 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 245.000.000
10. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 7.500.000**



1. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	356.850.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.999.332
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.679.149.332
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.679.149.332

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.